

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://ikbalkb05.wordpress.com/2012/06/23/kemiskinan-sebagai-masalah-sosial/> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2014 jam 09:00 Wib.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan. Oleh sebab itu Islam memperhatikan masalah kemiskinan.<sup>2</sup> Agama Islam telah menawarkan beberapa ajaran bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Syariat Islam Memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Diantara kewajiban yang di maksud adalah membayar zakat. Zakat adalah

---

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir .*Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 24.

ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat maupun sebagai suatu ibadah pokok (ibadah *mahdah*), zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi SAW. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minaddin bid darurah* atau di ketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>3</sup>

Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Rasulullah merupakan orang yang selalu mengutamakan zakat, sedekah, dan paling banyak sedekahnya, paling peduli terhadap orang lain, serta gemar menolong orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan terus menerus berzakat dan berinfaq, krisis kelaparan yang berakibat pada krisis kemanusiaan dapat diatasi dengan sebaik baiknya.<sup>4</sup>

Berdasarkan UU No: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat

---

<sup>3</sup> Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin*, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002, hlm. 73.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, hlm. 66.

(LAZ).<sup>5</sup> Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat. Ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat islam<sup>6</sup>. LAZ yang mengelola zakat, infak, sodaqah, dan wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu contoh adalah Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

Jika dilihat dari jumlah lembaga amil zakat yang ada sampai saat ini, seharusnya kehidupan umat muslim yang kurang beruntung telah dapat terbenahi dan terbantu oleh dana zakat yang terkumpul dengan nominalnya sangat tinggi. Namun pada kenyataannya masih banyak para kaum *mustahik* yang bahkan belum merasakan bantuan dari dana zakat sedikitpun. Menurut Mursidi dalam bukunya Akuntansi Zakat Kontemporer, pendistribusian dana zakat jika tepat sasaran dan dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil jumlah kelompok masyarakat yang kurang mampu dan

---

<sup>5</sup> UU No 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II

<sup>6</sup> *Op Cit*, h. 31

pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kelompok *muzakki*.<sup>7</sup>Permasalahan pengelolaan yang kurang baik oleh lembaga zakat memerlukan peraturan dan pembenahan secara profesional yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Apabila dana ZIS tersebut dapat berjalan dan dikelola dengan baik secara profesional dengan manajemen yang baik pula, maka dana ZIS akan mampu dan dapat menopang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan kaum dhuafa pada khususnya.

Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Lembaga BMH ini merupakan lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari para *muzakki* kepada para *mustahik* secara langsung dengan berbagai program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban umat muslim yang kurang beruntung. Namun tidak hanya sebatas tujuan tersebut, setiap lembaga zakat dituntut harus dapat membantu meningkatkan

---

<sup>7</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003. h. 169

kesejahteraan para *mustahik* dengan dana zakat yang terkumpul. Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

BMH memiliki program pendistribusian zakat yang cukup variatif dengan mempertimbangkan fungsi utama dari program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut adalah program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan dai yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.<sup>8</sup>

Pada tahun 2008 BMH membuka cabang di Kudus, kemudian mendapat legalisasi oleh BMH pusat dengan kepala cabang Ustadz Suryanto Khumaini, SE, dengan berbagai program keummatannya

---

<sup>8</sup>[www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)

yaitu program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial. Keberadaan BMH di harapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan umat di Kudus. Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan di Kudus mengalami peningkatan, hal ini di tunjukkan oleh data sebagai berikut :<sup>9</sup>

<b>Uraian</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>
Batas Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	218.411	237.643	256.745	276.317	299.097
Jml Pddk Miskin (000 orang)	69,3	70,1	70,20	73,59	84,86
Persentase Pddk Miskin (%)	8,62	8,63	9,02	9,45	10,80

\*) angka sementara

Dari data diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan penduduk mengalami peningkatan. Seharusnya dengan adanya Lembaga Amil Zakat seperti Baitul Maal Hidayatullah di Kudus dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebagaimana sesuai dengan misi dari lembaga tersebut yaitu mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan tinjauan diatas penulis tertarik melakukan penelitian di BMH Kudus yang mempunyai beberapa program pendistribusian zakat yang ada di dalamnya, serta berbagai

---

<sup>9</sup>[www.kuduskab.bps.go.id](http://www.kuduskab.bps.go.id)

permasalahan mengenai zakat yang muncul baik permasalahan intern maupun ekstern yang akan memberikan dampak positif dalam hal pendistribusian dana zakat yang optimal, karena BMH ini telah mampu menyentuh sampai ke pelosok desa yang belum pernah dijangkau oleh LAZ lain, oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Kudus).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendistribusian zakat di BMH Kudus ?
2. Bagaimana dampak pendistribusian zakat di BMH Kudus terhadap kesejahteraan *mustahik* ?

## **C. Tujuan dan Hasil Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat di BMH Kudus.
2. Untuk mengetahui dampak distribusi zakat di BMH Kudus terhadap kesejahteraan *mustahik*.

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu syari'ah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya mengenai pendistribusian zakat produktif dan konsumtif serta menjadi



rujukan penelitian berikutnya tentang pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai distribusi Zakat dalam peningkatan kesejahteraan *Mustahik*.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

Penelitian dari Muhammad Zuhri (2100246), mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul skripsi Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, masyarakat lebih memilih

melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Nurul Isnaini Lutviana dengan judul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)”, menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para *muzakki*. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah *muzakki* serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan *muzakki*. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, *muzakki*, dan *mustahik* setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.

Dwi Kristiono, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul Sistem Pengelolaan Zakat Amwal Studi Analisis Terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Daerah Kendal. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan normatifitas pengelolaan zakat dan praktek pengelolaan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah yang

dimaksud dengan zakat *amwal* berbeda dengan zakat mal. Zakat *amwal* adalah zakat yang dihitung berdasarkan keseluruhan pendapatan melalui perhitungan pendapatan kotor (bruto) dikurangi beban hutang (bruto-hutang). Pengelolaan zakat amwal dilakukan dengan cara amil menjemput zakat di tempat *muzakki*. Hasil zakat dari masyarakat Weleri tidak seluruhnya disalurkan kembali oleh Bapelurzam Cabang Weleri melainkan hanya 85% dari total pendapatan zakat, sedangkan sisanya yakni 10% untuk Pengurus Daerah Kendal dan 5% untuk Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang.

Berdasarkan kajian/telaah pustaka tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian yang peneliti akan lakukan memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada Analisis Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Di Baitul Maal Hidayatullah kudu) yaitu bahwa program – program yang berdampak langsung terhadap *mustahik* yaitu program-program pendidikan, sosial dan ekonomi. Pendistribusian dana zakat pada BMH Kudus ditujukan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan kedalam program-program dan penganggaran dalam program-program tersebut, apakah dengan cara diatas para *mustahik* mengalami peningkatan dalam hal kesejahteraan hidup ataukah malah sebaliknya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan diBMH kudu dan masyarakat tertentu yakni masyarakat yang berhak menerima zakat(*Mustahik*). Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana analisis pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap *mustahik*.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>10</sup> Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>10</sup> Jusuf Soewadji, *pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h.,51

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 6.

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sebagai obyek dari mana data-data dapat diperoleh.<sup>12</sup>Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.<sup>13</sup>Dalam hal ini penulis mengambil data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari:

- 1) Masyarakat penerima zakat (*mustahik*). Dalam rangka memperoleh data dari masyarakat penerima zakat yang diberikan oleh Lembaga BMH Kudus, maka penulis mengumpulkan data masyarakat dengan mengelompokkan data menjadi 2 sumber asal data, yaitu :
  - a) Masyarakat penerima zakat (*Mustahik*)
  - b) Dari pengurus atau anggota Lembaga BMH Kudus.
  - c) Amil LAZ BMH Kudus.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi seperti berupa profil Lembaga BMH Kudus, *Job's Description* masing-masing bagian dan perkembangan kesejahteraan *mustahik*, majalah,

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 107.

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, h.1.

internet, buku-buku yang mendukung penelitian ini, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>14</sup> Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Setelah mendapatkan data sekunder tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara (*Interview Guide*) secara terarah dan fleksibel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi dan penjelasan secara detail yang belum diperoleh pada studi data sekunder. Dalam wawancara, pembuktian dan penjelasan mengenai sesuatu yang masih kabur dapat dilakukan secepat mungkin, karena hubungan antara pewawancara dengan responden dekat sekali.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62.

<sup>15</sup> Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif [endekatan]*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006, h. 73.

Wawancara seperti ini sangat dibutuhkan untuk memahami lebih jauh berbagai interpretasi, persepsi, dan, perspektif dari berbagai keadaan yang menyangkut pokok bahasan penelitian. Adapun informan yang dijadikan objek dalam wawancara dimaksud, antara lain dilakukan kepada informan kunci, seperti kepada Ketua Lembaga BMH Kudus, Bendahara, Sekretaris, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendayagunaan Lembaga BMH, dan Staf Sekretariat Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kudus, dan beberapa orang *Mustahik* (penerima zakat).

Hasil wawancara tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan data yang lengkap dan akurat. Wawancara mendalam ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.<sup>16</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi,

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 188.

<sup>17</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h., 160.

presentasi serta data perkembangan zakat di Lembaga BMH Kudus.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data diatas mengenai analisis penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga BMH Kudus.

### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka akan memberikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan manfaat penulisan/penelitian
- D. Telaah pustaka
- E. Metode penulisan/penelitian
- F. Sistematika penulisan.

#### **BAB II :ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA**

- A. Zakat
  - 1. Pengertian zakat
  - 2. Dasar Hukum Zakat
  - 3. Syarat Wajib dan Sah Zakat
  - 4. Macam- macam Zakat



5. Hikmah Tujuan dan Manfaat Zakat

B. Tentang Pendistribusian zakat

1. Pengertian Pendistribusian Zakat
2. *Asnaf-asnaf* Penerima Zakat

C. Kesejahteraan

1. Definisi kesejahteraan
2. Indikator Kesejahteraan

BAB III PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH (BMH) KUDUS

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah Kudus

1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah Kudus
2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Kudus
3. Struktur Baitul Maal Hidayatullah Kudus

B. Program BMH Kudus Dalam Pendistribusian Zakat

C. Upaya Pendistribusian Zakat BMH Kudus dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*

BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK* DI  
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KUDUS.

A. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BMH Kudus

B. Analisis Pendistribusian Zakat di BMH Kudus dalam  
meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran